

**DYNAMIC CAPABILITIES DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (SIPPADU)**

**(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidoarjo)**

Auditya Desvananda Putra Purwanto¹, Susi Hardjati²

^{1,2} Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

¹audityadputrap2003@gmail.com, ²susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id,

ABSTRACT

The era of disruption and the policy of centralizing licensing through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) pose challenges to innovation in public services at the local level. This study aims to analyze the application of Dynamic Governance capabilities in the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPPADU) application at the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) of Sidoarjo Regency. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and document analysis using purposive sampling to select informants. Data analysis employed the Miles and Huberman interactive model, while the analytical framework utilized the Dynamic Governance theory by (Neo & Chen, 2007), which encompasses the aspects of “thinking ahead,” “thinking again,” and “thinking across.” The research results indicate that the Sidoarjo Regency DPMPTSP has comprehensively implemented all three of these capabilities. The “thinking ahead” aspect was implemented through a strategy to reposition SIPPADU as a complementary application to handle permits not covered by the OSS. The “thinking again” aspect was realized by redesigning SIPPADU into a “Next Generation” version based on performance evaluations and public feedback. Meanwhile, the “thinking across” aspect is achieved by adopting innovative practices from other agencies and combining them with local technological assets. This synergy of capabilities has proven effective in maintaining SIPPADU’s role as an adaptive, complementary system for ensuring the quality of public services in the region.

Keywords: Dyanmic Capabilities, Permit Services, SIPPADU

ABSTRAK

Era disrupsi dan kebijakan sentralisasi perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) menjadi tantangan bagi inovasi pelayanan publik di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kapabilitas *Dynamic Governance* pada penyelenggaraan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan pisau analisis menggunakan teori *Dynamic*

Governance oleh (Neo dan Chen, 2007) yang meliputi aspek *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan ketiga kapabilitas tersebut secara komprehensif. Aspek *thinking ahead* dilakukan melalui strategi reposisi SIPPADU sebagai aplikasi pendamping untuk melayani perizinan yang tidak tercover oleh OSS. Aspek *thinking again* diwujudkan dengan mendesain ulang (*redesign*) SIPPADU menjadi versi *Next Generation* berdasarkan evaluasi kinerja dan umpan balik masyarakat. Sementara aspek *thinking across* dilakukan dengan menyerap praktik inovatif dari instansi lain dan mengombinasikannya dengan aset teknologi lokal. Sinergi kapabilitas ini terbukti mampu menjaga eksistensi SIPPADU sebagai sistem pelengkap yang adaptif dalam menjaga kualitas pelayanan publik di daerah.

Kata Kunci: Dynamic Capabilities, Pelayanan Perizinan, SIPPADU

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang pesat, paradigma penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia mengalami perubahan signifikan. Tata pemerintahan saat ini dihadapkan pada era disrupsi yang ditandai dengan perubahan, ketidakpastian, kerumitan, dan ambiguitas (VUCA). Istilah disrupsi merujuk pada era transformasi fundamental yang mengubah cara suatu sistem beroperasi (Darmawati & Castrawijaya, 2025). Revolusi Industri 4.0 secara gamblang membawa kemajuan teknologi berupa kecerdasan buatan dan internet yang menuntut pemerintah agar bersifat responsif serta dinamis. Publik kini menginginkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, efisien, serta transparan, sehingga birokrasi

modern harus mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi digital ke dalam sistemnya (Pratiwi et al., 2025).

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *electronic government* (*e-government*) melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi ini merupakan upaya menciptakan birokrasi yang transparan, responsif, dan akuntabel (Prihartono, 2023). Melalui SPBE, pemerintah berupaya mewujudkan sistem yang terintegrasi secara digital antara pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tetap adaptif (Kencono et al., 2024). Tingkat kesiapan digital ini dapat diukur melalui indeks SPBE nasional yang menunjukkan tren

peningkatan komitmen digitalisasi pemerintah Indonesia setiap tahunnya.

Namun, transformasi digital pelayanan publik menghadapi tantangan kompleks, mulai dari infrastruktur hingga isu keamanan data. Tantangan tersebut diperumit oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem lama dengan teknologi baru yang membutuhkan investasi besar baik sumber daya manusia maupun finansial (Astuti dalam Daaris & Imam, 2024). Selain itu, terdapat hambatan berupa perubahan budaya organisasi dan resistensi terhadap adopsi teknologi baru (Wismayanti & Purnamaningsih dalam Daaris & Imam, 2024). Salah satu sektor yang paling krusial dalam transformasi ini adalah pelayanan perizinan berusaha, karena berdampak langsung pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah pusat telah berinovasi melalui kebijakan Online Single Submission (OSS) yang mengintegrasikan perizinan secara elektronik di seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (Lestari et al., 2024). Kebijakan ini diperkuat dengan konsep Risk Based

Approach (RBA) atau berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, di mana dokumen persyaratan ditentukan oleh tingkat risiko usaha (Sanjaya et al., 2022). Meskipun OSS telah menerbitkan jutaan izin, implementasinya di tingkat daerah seringkali memunculkan dinamika baru. Kebijakan sentralistik ini menciptakan "guncangan" bagi pemerintah daerah yang sebelumnya telah memiliki inovasi aplikasi lokal karena OSS terkadang belum mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah yang beragam (Arifin et al., 2024).

Kabupaten Sidoarjo, sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Jawa Timur, menghadapi tantangan adaptasi ini melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jauh sebelum kebijakan OSS wajib diberlakukan, DPMPTSP Sidoarjo telah memiliki inovasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) yang aktif sejak 2016. Munculnya OSS mengharuskan instansi melakukan reposisi agar tidak terjadi tumpang tindih layanan. Berdasarkan laporan tahun 2025, SIPPADU terbukti masih sangat dibutuhkan masyarakat dengan

realisasi penerbitan 1.693 izin untuk kategori non-OSS, seperti Izin Satuan Pendidikan, Izin Reklame, dan IUTS. SIPPADU dinilai efektif dalam meningkatkan akses layanan meskipun masih terdapat hambatan teknis (Nurwidiyanti dalam Fatih & Choiriyah, 2025; Nisak & Hertati, 2024).

Fenomena adaptasi ini merupakan wujud nyata praktik tata kelola pemerintahan yang dinamis. Untuk membedah realitas tersebut, diperlukan kerangka teori *Dynamic Governance*. Menurut (Neo & Chen, 2007), *dynamic governance* adalah kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publiknya agar kepentingan jangka panjang bangsa tercapai. Kapabilitas ini bergantung pada tiga proses pembelajaran fundamental: berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir ulang (*thinking again*), dan berpikir lintas batas (*thinking across*). *Thinking ahead* memungkinkan instansi melihat posibilitas masa depan, *thinking again* mengevaluasi kebijakan lama agar tetap relevan, dan *thinking across* belajar dari praktik terbaik pihak lain untuk diadopsi ke konteks lokal.

Penelitian terdahulu mengenai SIPPADU mayoritas masih berfokus

pada evaluasi hasil dan efektivitas pelayanan secara umum. Masih terdapat celah penelitian dalam mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kapabilitas dinamis instansi daerah menghadapi disrupsi kebijakan pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kapabilitas *Dynamic Governance* pada penyelenggaraan SIPPADU oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo di era transisi kebijakan OSS. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis mengenai manajemen perubahan sektor publik serta referensi praktis bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola inovasi lokal di tengah dinamika regulasi nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali makna, motif, serta dinamika dari suatu realitas sosial secara alamiah. Pemilihan metode ini sejalan dengan pandangan (Creswell & Creswell, 2023) yang menyatakan bahwa riset kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan individu atau

kelompok pada masalah sosial. Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus analisis pada penerapan kapabilitas Dynamic Governance menurut kerangka teori Neo & Chen (2007) yang meliputi dimensi thinking ahead, thinking again, dan thinking across.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2023), teknik ini merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, di mana informan yang dipilih dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti. Informan kunci yang dilibatkan meliputi Kepala Dinas, Pejabat Fungsional/Koordinator, operator aplikasi SIPPADU, serta perwakilan masyarakat pengguna layanan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap operasionalisasi sistem, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan realisasi perizinan dan regulasi terkait.

Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1984)

sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2023), yang terdiri dari empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan temuan, peneliti menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan objektivitas hasil penelitian agar benar-benar bersumber dari data empiris di lapangan dan bukan merupakan asumsi subjektif peneliti (Sugiyono, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil temuan di lapangan, akan dilakukan pembahasan terhadap tiga kapabilitas utama yang dicanangkan oleh (Neo & Chen, 2007). Pertama yakni kapabilitas thinking ahead, thinking ahead merupakan elemen krusial dalam kerangka tata kelola dinamis yang menuntut institusi untuk memiliki kecerdasan taktis dalam memprediksi ketidakpastian masa depan guna menjaga keberlanjutan program. Menurut Neo dan Chen (2007), kapabilitas ini didefinisikan sebagai kemampuan institusi untuk melihat melampaui masa kini dengan

mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami implikasinya terhadap tujuan organisasi, serta merumuskan opsi strategi untuk mengeksplorasi peluang sekaligus memitigasi ancaman. Secara filosofis, kerangka waktu dari kapabilitas ini bergerak mundur, di mana institusi yang sudah memproyeksikan kondisi masa depan kembali ke masa sekarang menggunakan perspektif dari luar ke dalam (*outside-in*) mengenai bagaimana ketidakpastian eksternal akan memengaruhi pencapaian sasaran institusi.

Aktivitas eksplorasi tren di DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo memiliki karakteristik unik karena tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi informasi semata, melainkan sangat mempertimbangkan dimensi politik nasional. Pihak instansi menyadari sepenuhnya bahwa jabatan pimpinan merupakan jabatan politik yang arah kebijakannya dapat berubah sewaktu-waktu seiring pergantian kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai dengan premis Neo dan Chen (2007), aktivitas ini merupakan wujud dari keterlibatan aktor dalam sebuah "percakapan strategis" agar birokrasi tidak terjebak dalam kepanikan atau

guncangan mendadak atau *shock* saat terjadi perubahan aturan, melainkan tetap mampu menyiapkan langkah adaptasi sistem pelayanan yang relevan.

Aspek selanjutnya adalah kemampuan aparatur dalam mempersepsikan pengaruh kebijakan sentralisasi perizinan nasional yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) terhadap eksistensi inovasi daerah. Munculnya kebijakan OSS-RBA dari pemerintah pusat diidentifikasi sebagai sebuah tantangan yang menuntut respons cepat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan. DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo secara visioner melihat adanya celah kebijakan di mana sistem pusat tidak akan mampu mengakomodasi seluruh karakteristik kebutuhan perizinan lokal yang sangat beragam. Pemahaman ini mendorong instansi untuk tidak menghapus inovasi SIPPADU yang sudah ada, melainkan menyesuaikan fungsinya agar tetap memberikan kepastian waktu dan kemudahan akses bagi masyarakat Sidoarjo.

Strategi utama yang lahir dari kapabilitas *thinking ahead* ini adalah keputusan untuk melakukan Reposisi SIPPADU sebagai Aplikasi

Pendamping. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari perumusan opsi strategi untuk memitigasi ancaman hilangnya kewenangan daerah akibat sentralisasi. SIPPADU kini difokuskan untuk melayani jenis perizinan yang tidak terakomodasi oleh sistem OSS pusat, seperti Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Izin Penyelenggaraan Reklame, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Strategi reposisi ini membuktikan bahwa instansi mampu menyegarkan kembali tujuan organisasi dan mengonseptualisasikan inisiatif kebijakan baru di tengah dinamika regulasi nasional.

Keberhasilan implementasi strategi tersebut didorong oleh peran kepemimpinan dinamis dalam meyakinkan pemangku kepentingan. Berdasarkan temuan di lapangan, pimpinan DPMPTSP Sidoarjo memiliki visi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga langkah-langkah strategis untuk mempertahankan SIPPADU dapat segera diputuskan tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Sesuai pandangan Neo dan Chen (2007), kapabilitas organisasi adalah cara-

cara khas suatu institusi dalam melakukan sesuatu yang dikembangkan melalui proses pembelajaran jangka panjang. Hal ini didukung oleh investasi strategis pada infrastruktur digital dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mumpuni di area pelayanan guna memastikan ide-ide visioner tersebut dapat dieksekusi secara profesional.

Penerapan kapabilitas *thinking ahead* ini pada akhirnya memberikan dampak nyata yang divalidasi oleh kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. Respon positif masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya layanan perizinan online yang bisa diakses dari rumah menunjukkan bahwa strategi reposisi SIPPADU telah berhasil menjawab ekspektasi publik di era digital. Sinergi antara ketajaman membaca arah politik, visi kepemimpinan, dan kesiapan infrastruktur telah memungkinkan SIPPADU tetap eksis sebagai instrumen pelayanan publik yang adaptif dan menjamin kualitas pelayanan bagi warga Sidoarjo di masa depan.

Kedua adalah kapabilitas *thinking again*. Dalam kerangka *Dynamic Governance*, kapabilitas

thinking again menuntut keberanian intelektual dan emosional institusi untuk menghadapi realitas kinerja saat ini guna melakukan koreksi melalui proses desain ulang yang berkelanjutan. Neo dan Chen (2007) menjelaskan bahwa *thinking again* adalah kemampuan untuk meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program yang sedang berjalan guna menilai apakah hasil yang dicapai telah memenuhi harapan atau perlu diperbaiki demi kualitas yang lebih baik. Berbeda dengan *thinking ahead* yang bersifat antisipatif terhadap masa depan, *thinking again* menggunakan perspektif dari dalam ke luar (*inside-out*) dengan berpatokan pada data aktual, pengukuran kinerja, dan umpan balik masyarakat sebagai bahan refleksi kritis bagi organisasi.

Hambatan utama dalam proses berpikir ulang seringkali muncul dari "jebakan kompetensi", di mana keberhasilan masa lalu membuat birokrasi enggan mengevaluasi kebijakan yang dirasa masih berjalan lancar. Menurut Neo dan Chen (2007), keahlian dalam melakukan sesuatu dengan baik dapat berubah menjadi kekakuan yang menghalangi pembelajaran lebih lanjut dan

melahirkan penyakit *groupthink* atau pemikiran kelompok. Di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, risiko kekakuan ini dimitigasi melalui budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi berbasis fakta. Instansi secara sadar menyediakan wadah bagi aparatur untuk terus bertanya mengapa suatu hasil terjadi, guna menghilangkan kecenderungan birokrasi dalam mengambil pujian yang tidak semestinya atas sebuah keberhasilan sistem.

Secara operasional, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan mekanisme peninjauan data kinerja melalui instrumen digital terintegrasi berupa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada portal SIPPADU. Penggunaan data aktual dan umpan balik publik ini selaras dengan tahapan yang dirumuskan oleh Neo dan Chen (2007) untuk memahami dinamika penerimaan masyarakat secara objektif. Penilaian kinerja yang dilakukan tidak hanya terpaku pada aspek teknis aplikasi semata, melainkan pada ekosistem pelayanan secara menyeluruh guna memastikan bahwa SIPPADU tetap bernilai guna sebagai instrumen pelayanan publik

yang responsif terhadap ekspektasi warga Sidoarjo.

Jejak historis kapabilitas *thinking again* di lokasi penelitian juga terlihat dari keputusan strategis pada tahun 2012 untuk melakukan "intervensi kebijakan" terhadap budaya masyarakat. Saat ditemukan adanya keengganan warga untuk beralih ke layanan digital, pimpinan instansi mengambil langkah berani dengan menutup layanan *offline* secara bertahap guna memaksa terjadinya transformasi literasi digital. Langkah ini mencerminkan keberanian pemimpin dalam memikirkan ulang cara-cara lama yang kaku untuk mencapai efisiensi birokrasi yang lebih tinggi, yang merupakan inti dari kapasitas institusional untuk terus belajar. Transformasi ini terbukti berhasil memutus rantai birokrasi konvensional dan menciptakan kemandirian akses bagi masyarakat pengguna layanan.

Penyelidikan terhadap akar permasalahan juga dilakukan melalui wadah evaluasi institusional yang terstruktur berupa rapat rutin minimal dua kali dalam setahun. Mekanisme ini berfungsi untuk membedah komplain teknis dan hambatan sistem di luar jam kerja aktif agar tidak

mengganggu kualitas pelayanan harian. Kehadiran sumber daya manusia yang tangkas (*able people*), khususnya tim IT yang responsif dalam mengeksekusi perbaikan sistem, menjadi penggerak teknis yang menjamin bahwa proses *thinking again* tidak berhenti pada tataran diskusi saja, melainkan berlanjut pada tindakan korektif yang nyata bagi kenyamanan pengguna layanan.

Puncak dari penerapan kapabilitas ini adalah keputusan untuk melakukan Desain Ulang (*Redesign*) Parsial SIPPADU sebagai respons adaptif terhadap kebijakan sentralisasi OSS-RBA. Melalui pemilahan fitur secara rasional, DPMPTSP Sidoarjo menghapus layanan yang telah terakomodasi oleh sistem pusat dan memfokuskan SIPPADU pada izin-izin spesifik lokal seperti Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Izin Penyelenggaraan Reklame. Hasil dari proses berpikir ulang ini dikukuhkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 188/277/438.5.16/2022 tentang penggunaan aplikasi SIPPADU versi Next Generation (Next-G). Keberlanjutan sistem yang divalidasi oleh realisasi penerbitan 1.723 izin pada tahun 2025

membuktikan bahwa keberanian mengevaluasi diri mampu menjaga eksistensi inovasi daerah di tengah dinamika regulasi nasional.

Ketiga yakni kapabilitas *Thinking Across*. Kapabilitas *thinking across* atau berpikir lintas batas merupakan kapasitas intelektual dan operasional suatu instansi pemerintah untuk keluar dari batas-batas konvensional organisasi guna memetik pelajaran, mengadopsi praktik terbaik, serta menyerap ide-ide inovatif dari lingkungan eksternal. Neo dan Chen (2007) mendefinisikan kapabilitas ini sebagai kemampuan untuk melintasi batas-batas tradisional berupa fungsi, hierarki, organisasi, sektor, maupun batas geografis guna mencari ide dan praktik menarik yang dapat disesuaikan dengan lingkungan lokal. Kerangka waktu dan perspektif untuk pemikiran adaptif ini ditarik dari kondisi masa kini di luar menuju masa depan di dalam (*outside-in*), yang mengharuskan pemerintah untuk membuang jauh-jauh ego sektoral dan terbuka terhadap eksperimen yang dilakukan di tempat lain.

Di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, penerapan kapabilitas ini diwujudkan melalui serangkaian agenda kunjungan kerja strategis ke

berbagai instansi yang dinilai memiliki kematangan sistem informasi. Instansi melakukan pencarian ide secara vertikal dan horizontal dengan mengunjungi institusi yang memiliki karakteristik pelayanan publik masif, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengidentifikasi keandalan sistem informasi berskala nasional, serta DPMPTSP Provinsi Jawa Timur untuk mempelajari praktik operasional sesama instansi pelaksana perizinan. Langkah ini sejalan dengan premis Neo dan Chen (2007) bahwa dalam ekosistem pemerintahan yang kompleks, birokrasi tidak boleh merasa paling benar dan harus aktif membangun jaringan lintas batas untuk menemukan solusi holistik.

Proses *thinking across* di lokasi penelitian tidak hanya berhenti pada tahap pencarian ide, melainkan berlanjut pada aktivitas refleksi kritis terhadap apa, mengapa, dan bagaimana pihak lain melakukan inovasi. Peneliti menganalisis bahwa DPMPTSP Sidoarjo secara teliti mengevaluasi kendala teknis yang ditemui di instansi lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa pada sistem lokal mereka. Sebagai contoh, refleksi terhadap kegagalan teknis

modul *e-payment* di instansi vertikal menjadi dasar bagi tim IT Sidoarjo untuk sangat selektif dalam membangun sistem pembayaran pada SIPPADU. Hal ini memperkuat argumen Neo dan Chen (2007) bahwa pengamatan terhadap domain lain memungkinkan aparaturnya untuk melihat kebijakan mereka sendiri dari sudut pandang baru dan mempertanyakan praktik-praktik lama mereka sendiri.

Fenomena yang paling menonjol dalam penerapan kapabilitas ini adalah kemampuan instansi dalam menemukan koneksi baru antara berbagai ide yang berbeda untuk menciptakan inovasi yang unik. SIPPADU lahir dari kombinasi cerdas tiga elemen utama: kerangka kerja sistem informasi Kemenkumham, pola aplikasi DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, serta pemanfaatan kembali memori institusional melalui basis aplikasi lokal lama bernama "SIPP" tahun 2010. Meskipun aplikasi SIPP 2010 sebelumnya dianggap gagal akibat rendahnya literasi digital masyarakat saat itu, melalui proses *thinking across*, kegagalan tersebut ditransformasikan kembali menjadi sistem baru yang jauh lebih fungsional dan canggih.

Kemandirian dalam pengembangan sistem juga menjadi poin penting, di mana DPMPSTSP Sidoarjo menyerap pengetahuan dari luar tanpa membangun ketergantungan teknologi terhadap instansi mitra. Menurut Neo dan Chen (2007), tujuan utama dari *thinking across* adalah mengadaptasi ide-ide paling kreatif di mana pun ide itu berada dan menyesuaikannya agar sesuai dengan persyaratan kebijakan lokal serta kebutuhan warga. Oleh karena itu, draf fitur pada SIPPADU tetap dikembangkan berdasarkan keandalan internal dinas dengan tetap berpegang pada prinsip kemudahan, transparansi, dan keamanan yang sesuai dengan karakteristik unik masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Hasil nyata dari efektivitas kapabilitas *thinking across* ini divalidasi oleh pengakuan nasional yang luas, di mana SIPPADU ditetapkan sebagai Role Model oleh KPK pada tahun 2016 dan telah direplikasi oleh 57 kabupaten/kota lain di Indonesia. Selain itu, kepuasan masyarakat yang merasa terbantu dengan kecanggihan sistem dalam memangkas hambatan geografis membuktikan bahwa produk tata kelola dinamis ini telah berhasil

menjawab kebutuhan riil publik. Sinergi antara proses pencarian, refleksi, dan kombinasi ide lintas batas ini menegaskan bahwa DPMPTSP Sidoarjo telah berhasil mentransformasi aset teknologi lama menjadi inovasi modern yang adaptif dan kompetitif di era digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai penerapan kapabilitas *Dynamic Governance* pada penyelenggaraan SIPPADU di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa instansi telah berhasil mengimplementasikan ketiga kapabilitas dinamis secara komprehensif. Pada dimensi *thinking ahead*, DPMPTSP Sidoarjo menunjukkan kemampuan prediktif yang tajam dalam mengantisipasi disrupsi kebijakan sentralistik nasional melalui sistem OSS-RBA. Strategi reposisi fungsional SIPPADU sebagai aplikasi pendamping merupakan langkah visioner untuk mengisi "celah layanan" yang tidak terakomodasi oleh sistem pusat, sekaligus menjaga kedaulatan digital daerah dalam pelayanan publik.

Pada dimensi *thinking again*, instansi secara konsisten melakukan

evaluasi berbasis fakta melalui instrumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan rapat evaluasi rutin untuk mendeteksi kendala teknis maupun tumpang tindih sistem. Keberanian intelektual untuk melakukan desain ulang (redesign) secara parsial melahirkan SIPPADU versi *Next Generation* (Next-G) yang lebih fokus pada layanan spesifik non-OSS. Langkah ini terbukti efektif secara empiris dengan stabilnya angka realisasi penerbitan izin yang mencapai 1.723 izin pada tahun 2025, yang menegaskan bahwa inovasi daerah tetap bernilai guna di tengah dinamika regulasi nasional.

Sementara itu, pada dimensi *thinking across*, DPMPTSP Sidoarjo menunjukkan keterbukaan untuk menyerap praktik inovatif dari instansi lain seperti Kemenkumham dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Instansi tidak sekadar melakukan replikasi mentah, melainkan melakukan refleksi kritis yang dikombinasikan dengan pemanfaatan kembali aset teknologi lokal lama (SIPP 2010). Sinergi ketiga kapabilitas ini telah menghasilkan kebijakan adaptif yang mampu mentransformasi tantangan sentralisasi menjadi peluang untuk memperkuat sistem

pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan bagi warga Sidoarjo.

Kemudian untuk mempertahankan serta meningkatkan penyelenggaraan SIPPADU di masa depan, peneliti merumuskan beberapa saran strategis. Pertama, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo perlu mengembangkan fitur *Notification* otomatis berbasis *WhatsApp* atau *SMS Gateway* yang terintegrasi langsung dengan sistem untuk meningkatkan transparansi status izin secara *real time* kepada masyarakat. Kedua, disarankan adanya standarisasi dokumen digital berbasis *cloud* untuk menjamin efisiensi jangka panjang, sehingga pemohon tidak perlu mengunggah ulang dokumen dasar yang sama saat melakukan pembaruan izin. Ketiga, instansi perlu melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan membentuk kelompok uji coba kecil yang melibatkan masyarakat sebelum merilis fitur baru guna memastikan aplikasi tetap ramah pengguna (*user friendly*) dan adaptif terhadap kebutuhan publik yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (L. Fargotstein, Ed.; 6th ed.). SAGE Publications.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. <https://doi.org/10.1142/6458>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA.

Jurnal :

- Arifin, Mustofa, A., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3), 12–23.
- Daaris, Y. Y., & Imam, S. (2024). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Pelajaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 244–255.
- Darmawati, N., & Castrawijaya, C. (2025). The Transformation of Da'wah Institutions: Developing Entrepreneurial Products in the Disruptive Era. *ABDURRAUF: Journal of Islamic Studies*, 4(3), 255–274.

- <https://doi.org/10.58824/arjis.v4i3.446>
- Fatih, M. F., & Choiriyah, I. U. (2025). Analysis of SIPPADU Success in Public Services at DPMPTSP Sidoarjo. *International Conference on Social Science and Humanity*, 2(2), 2236–2246.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Lestari, N. S., Arenawati, & Stiawati, T. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Kabupaten Serang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 243–252.
- Nisak, I., & Hertati, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 440–452.
- Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., Aisyah, I. S., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Implementasi Digital pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan di Era Birokrasi Modern. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 38–44.
- Prihartono, D. (2023). Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance pada Era Revolusi Industri 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192–201.
- Sanjaya, I. K. B. H. R., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 28–33.